

Tinjauan Mata Kuliah

E sensi dari pembangunan adalah proses pemberdayaan diri (*self empowering*) bagi setiap individu agar bebas dari segala bentuk belenggu keterbelakangan dan mampu mewujudkan semua aspirasinya sampai pada level yang paling humanistik. Dalam tataran kehidupan sehari-hari, wujud dari proses pembangunan tersebut utamanya adalah menjadikan setiap individu usia produktif bekerja secara aktif, yang berarti tidak menganggur sehingga tidak memerlukan uluran bantuan (*charity*) terus-menerus. Setiap individu yang bekerja berarti tidak mungkin hanya seorang diri, melainkan selalu berhubungan dan melakukan relasi dengan pihak lain ataupun dengan lingkungannya. Agar relasi tersebut langgeng, antara individu satu dengan lainnya selalu memerlukan berbagai macam tata aturan untuk sama-sama dipatuhi. Tata aturan ini dapat berupa tata aturan yang bersifat normatif dan rekognisi budaya (tidak tertulis) hingga yang tertulis (regulatif) menggunakan hukum positif yang penegakannya menggunakan proses peradilan. Tata aturan ini dikenal sebagai lembaga (*institution*). Tata aturan ini idealnya perlu dibangun melalui institusi rumah tangga karena intensitas hubungan antaranggota rumah tangga sangat tinggi yang membuat norma-norma tertanam kuat bahkan diwariskan. Selain itu, rumah tangga juga merupakan akar dari negara, alias unit terkecil dari negara. Termasuk di dalamnya norma hubungan untuk menghargai yang lebih tua (hubungan struktural atau ordinansi) maupun hubungan sesama anak atau anggota keluarga (hubungan koordinasi) yang keduanya akan menjadi suatu oragnisasi rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, penuh dengan etika dan moral yang agung pula.

Kuatnya nilai-nilai etika moral yang telah tertanam dalam institusi rumah tangga ini akan mewarnai bahkan menjadi teladan dalam berhubungan dengan berbagai individu lain di luar rumah tangga, baik mulai dari rukun tetangga, ke kelompok kecil di kantor, ke level komunitas lokal, nasional, bahkan ke komunitas global dalam berbagai sektor kehidupan. Demikian pula dalam bidang lingkungan, akan menjadi determinan bagi keefektifan tatanan kelembagaan, dapat mengendalikan perilaku etik dalam merawat (*nurturing*) dan mengembangkan kinerja lingkungan dari level lokal sampai ke level global. Oleh karena itu, dalam rangka membentuk karakter calon lulusan magister MSLK sebagai calon pengelola pembangunan lingkungan yang punya integritas tinggi, perlu dirancang MK Kelembagaan Lingkungan (MSLK5102) ini dalam 9 modul judul dengan deskripsi berturut-turut sebagai berikut.

- Modul 01 Hubungan Kinerja Lingkungan, Tataan Kelembagaan dan Peradaban.** Dalam bagian ini mahasiswa diperkenalkan tentang adanya pertautan kinerja, tataan kelembagaan dan fase pembangunan dan peradaban. Merujuk pada Hukum Environmental Kusnetz Curve maka perlu menggugah mahasiswa tentang adanya realitas kinerja lingkungan merupakan cerminan dari fase perkembangan peradaban. Membangun peradaban pada esensinya adalah sama dengan membangun tataan kelembagaan, di mana kinerja lingkungan merupakan indikator keberlanjutan dalam membangun peradaban. Oleh karena itu, dalam bagian ini mahasiswa distimulasi untuk mengembangkan kapasitas penalarannya tentang esensi dari lingkungan, batasan tentang kelembagaan dan kelembagaan lingkungan, bentuk, jenis, lingkup, dan tingkat perkembangan kelembagaan.
- Modul 02 Peranan Kelembagaan dalam Menata Relasi Manusia dengan Lingkungan.** Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi hidupnya, manusia sebagai makhluk yang paling cerdas senantiasa melakukan relasi dan interaksi dengan sesama individu manusia lainnya maupun dengan lingkungan. Relasi dan interaksi tersebut perlu tataan agar lingkungan tidak mengalami degradasi dan mampu memberikan daya dukung secara berkelanjutan. Agar relasi antarindividu tersebut tidak antagonistik dan tidak terjadi konflik maka diperlukan jasa penengah yang amanah yang kemudian dikenal sebagai otoritas publik. Mahasiswa perlu mahami sifat-sifat dasariah manusia melalui telaah teori-teori *trait*, *behavioristik*, dan *psycho-analysis*. Pemahaman ini penting untuk dapat meng-*comprehend* proses-proses evolusi kelembagaan dan pentingnya etika lingkungan dalam membangun peradaban.
- Modul 03** Berjudul: **Lingkungan sebagai Sumber Daya Bersama.** Isi pesan utama dari bagian ini adalah bahwa lingkungan merupakan entitas atau ruang yang tidak bisa dibagi-bagi secara mutlak kepada individu-individu dan begitu pula pemafaatannya maupun mudaratnya tidak bisa dieksklusifkan kepada individu-individu tertentu. Artinya lingkungan disebut sebagai sumber daya bersama (*CPR=common pool resource*). Karena itu, mahasiswa dibawa pada pemahaaman tentang konsep nilai dan regim kepemilikan barang (*private*, *club*, *CPR*, dan *pure public good*) beserta pengelolaannya. Fokusnya kemudian pada realitasnya bahwa lingkungan sebagai *CPR* memerlukan tataan kelembagaan yang khusus agar dapat menopang keberlanjutan peradaban. Dalam kaitan itu, mahasiswa ditargetkan memahami fenomena *the tragedy of the common* dan kutukan sumber daya agar mampu merancang pengembangan kelembagaan lingkungan untuk menghindarinya.

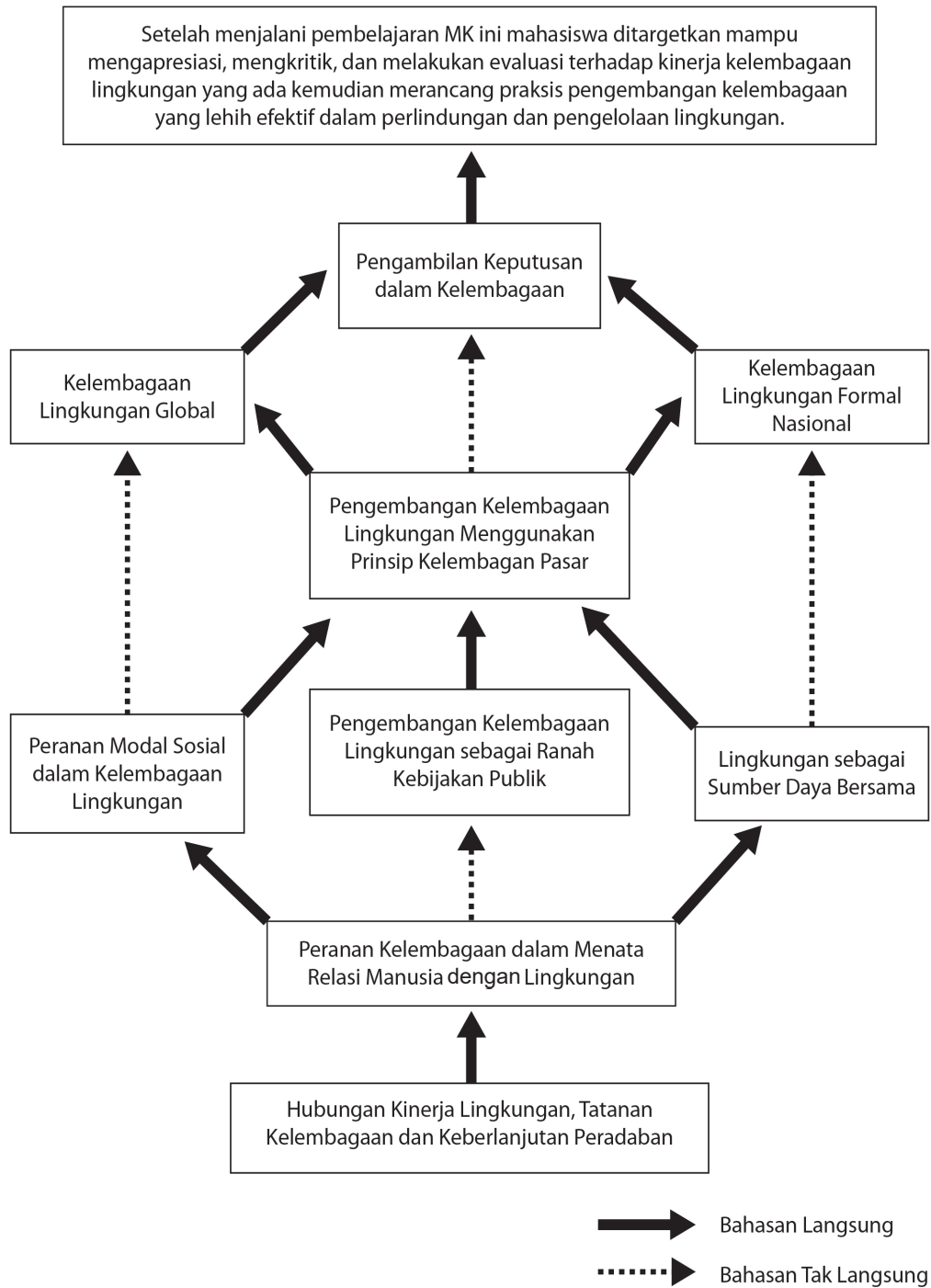
- Modul 04 Peranan Modal Sosial dalam Kelembagaan Lingkungan.** Pada dasarnya pembangunan adalah membangun institusional-kultural-sosial (*cultural-institutional development*) dalam arti yang esensial adalah membangun *trust* untuk meraih *high trust society* yang merupakan sebutan dari masyarakat di negara-negara maju. Tatanan kelembagaan merupakan pilar penting untuk meraih sebutan itu yang tidak bisa dihindarkan untuk mengakumulasi modal sosial. Oleh karena itu, mahasiswa ditargetkan mampu melakukan riset tentang peranan modal sosial sebagai suprastruktur dalam pengembangan kelembagaan tak terkecuali kelembagaan lingkungan yang merupakan *public domain*, baik itu di level mikro, meso, maupun makro.
- Model 05 Pengembangan Kelembagaan Lingkungan sebagai Ranah Kebijakan Publik.** Sebagai implikasi dari karakter lingkungan yang tidak bisa didistribusikan kepada individu-individu maka pengembangan kelembagaan penatakelolaan lingkungan pada prinsipnya adalah domain publik terutama sekali jika kelembagaan lokal tidak efektif dalam mengatur pemanfaatan maupun dalam mengelola mudaratnya. Karena itu penting menargetkan mahasiswa memahami pengertian kebijakan publik di bidang lingkungan, mampu mengaplikasikan kriteria teknokratik untuk pengembangan kebijakan, dan sekaligus mampu merancang praksis pengembangan kebijakan kelembagaan lingkungan.
- Modul 06 Pengembangan Kelembagaan Lingkungan Menggunakan Prinsip Kelembagaan Pasar.** Dalam bagian ini mahasiswa ditargetkan mampu menjabarkan fenomena kegagalan sistem pasar kapitalis (*market failure*) dan sekaligus mampu mengabstraksikan pencegahan kegagalan pemerintah (*government failure*) agar mampu menerangkan campur tangan pemerintah dalam mengembangkan kelembagaan lingkungan dalam rangka mencegah degradasi lingkungan. Karena itu, mahasiswa dibawa pada suasana belajar pengembangan kelembagaan lingkungan melalui praksis pembebanan pajak emisi, pemberian izin kuota pelepasan emisi (*TDP: transferable discharge permit*).

Modul 07 Anatomi Kelembagaan Lingkungan Formal Nasional. Dalam setiap negara demokratis dapat dipastikan penerapan tata aturan formal sebagai suprastruktur mendasar dalam bentuk tata peraturan perundang-undangan berupa menerapkan hukum positif. Pada bagian ini mahasiswa ditargetkan mampu menyusun hierarki tata peraturan hukum formal nasional. Lebih lanjut, secara khusus mahasiswa mampu melakukan apresiasi maupun kritik terhadap undang-undang yang berkaitan dengan kelembagaan lingkungan maupun bidang-bidang relevan termasuk bidang kehutanan, penataan ruang, kesehatan masyarakat, sumber daya air, dan konservasi keanekaragaman hayati dsb. Mahasiswa juga ditargetkan mampu mengabstraksikan sinergitas berbagai peraturan perundangan dalam pengembang kelembagaan lingkungan.

Modul 08 Kelembagaan Lingkungan Global. Dewasa ini dunia seolah telah menyatu sebagai *the gobal village*, lingkungan menjadi *global common*, dampak dari degradasi lingkungan atau kontaminan dapat menyebar lintas benua melalui atmosfer, transportasi laut, dan udara melalui pergerakan orang dan barang atau emisi. Kini emisi ke atmosfer dari gas-gas antropogenik sejak Revolusi Industri 1.0 telah menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim dan telah membawa kesadaran bersama untuk menyelamatkan ekosistem bumi sejak deklarasi Bruntland 1972 dan puncaknya pada KTT Bumi 1992 yang menelorkan 3 kelembagaan lingkungan global yang sudah diratifikasi oleh banyak negara termasuk Indonesia, yaitu UNFCCC, UNCBD, dan UCCCD. Dari ketiganya kelembagaan UNFCCC yang terus berkembang menjadi etika global. Oleh karena itu, dengan mempelajari Modul 08 ini mahasiswa ditargetkan mampu mengabstraksikan perkembangan inovasi kelembagaan lingkungan dan mampu melakukan evaluasi global, dari UFCC, Protokol Kyoto, dan Persetujuan Paris. Lebih lanjut juga, mampu melakukan evaluasi 3 mekanisme perdagangan karbon khususnya terbentuknya kelembagaan pasar karbon antara negara maju dengan negara berkembang yang dikenal sebagai CDM (*clean development mechanism*).

Modul 09 Pengambilan Keputusan dalam Kelembagaan. Seluruh kemampuan yang dicapai melalui pembelajaran Modul 01 sampai Modul 08 akan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dalam kelembagaan lingkungan. Situasi dalam pengambilan keputusan pada prinsipnya dapat dikelompokkan ke dalam dua, yaitu (i) keputusan tanpa ada situasi konflik dan (ii) yang berada dalam situasi konflik. Dengan mempelajari Modul 09 ini, mahasiswa ditargetkan mampu melakukan pengambilan keputusan dalam kedua situasi tersebut secara optimal terutama sekali dalam rangka untuk pengembangan strategi pembangunan kelembagaan lingkungan dari level lokal, nasional, hingga level global. Pada prinsipnya untuk pengambilan keputusan pada situasi tanpa konflik mahasiswa untuk pengembangan akal sehat dengan menggunakan metode kuantitatif yang relatif sederhana bagi seseorang yang sudah menyandang gelar sarjana. Sementara itu, pada situasi yang ada konflik, mahasiswa dilatih untuk menerapkan *game theory*. Dengan *game theory* ini, mahasiswa akan dapat mengambil hikmah bahwa bekerja sama dalam berbagai macam bentuk untuk selalu memegang etika dan moral akan berbuah pada keuntungan dan kemaslahatan bersama, terhindar dari situasi dilema narapidana yang sangat menguras segala sumber daya dan berdampak baik terhadap kinerja lingkungan yang berkelanjutan

Peta Kompetensi Kelembagaan Lingkungan/MSLK5102/3 SKS



Petunjuk Cara Mempelajari BMP

Untuk lebih memudahkan Anda mempelajari setiap modul dalam mata kuliah ini, Anda disarankan untuk memperhatikan hal-hal berikut ini.

1. Mencermati setiap modul dengan baik disertai dengan selalu mempertanyakan dalam benak atau mengkritisi setiap frase, setiap kalimat, setiap paragraf, “Apakah benar ini?”
2. Membuat catatan kemungkinan jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul dalam benak Anda. Buatlah kata-kata kunci untuk mengembangkan argumen yang lebih baik menurut hikmat Anda.
3. Membuat rangkuman terhadap setiap gagasan yang bersifat konseptual maupun yang esensial untuk setiap modul.
4. Mengerjakan setiap latihan dengan memperhatikan petunjuk menjawabnya. Demikian juga kerjakan tes formatif setiap modul, kemudian konfrontir jawaban Anda dengan kunci jawaban yang telah disediakan di setiap akhir modul.
5. Membuat inventarisasi semua permasalahan yang Anda masih merasa gamang atau belum sepenuhnya paham. Kemudian diskusikan dengan rekan, kelompok belajar, atau sampaikan ke tutor ketika kegiatan saat tutorial *online*.

